

**ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas Dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi S1
dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh:

Ani Sholeha

NPM : 1551010016

Jurusan : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Desa Subik merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Setiap Desa dipastikan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah yang disebut Dana Desa. Menurut masyarakat Desa Subik mereka menuturkan bahwa belum terlihat secara spesifik adanya pembangunan seperti perbaikan jalan desa yang berlubang parah disepanjang desa, pembangunan gorong-gorong atau drainase dan juga pemberian sumur bantuan dari pemerintah terkhusus untuk masyarakat kurang mampu yang belum memiliki sumur. Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana manajemen dana desa terhadap pembangunan desa Subik di Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dan Bagaimana pembangunan desa pada desa Subik di Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara di tinjau menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 982 KK dan sampel 91 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Kesimpulannya bahwa manajemen Dana Desa di Desa Subik adalah sebesar 88,53% termasuk dalam kategori cukup efektif. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dimana dalam proses pengelolaan dana desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pada tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa sudah cukup efektif dimana dana yang dianggarkan untuk pembangunan sudah lebih besar. Menurut Islam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara sudah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci : Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Endro Suratin Sukarame 1 Tlp. (021) 704030 Fax. 7051 Bandar Lampung 35151

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (Studi Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah
Kabupaten Lampung Utara)**

Nama : **ANI SHOLEHA**
NPM : **1551010016**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

• **Pembimbing I**

Pembimbing II

Budimansyah.S.Thi., M.Kom.I

Femei Purnamasari, SE., M.Si

NIP. 1977072520022121001

NIP. 1984052120150320

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.S.I

NIP. 1975042420021210



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Tlp. (021)704030 Fax. 7051 Bandar Lampung 35151

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara).

disusun oleh : **Ani Sholeha, NPM : 1551010016, Jurusan : Ekonomi**

Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 6 Februari 2020.**

TIM MUNAQSAH

Ketua : Madnasir, M.S.I

Penguji 1 : Fatih Fuadi, S.E.I., M.Si.

Penguji 2 : Budimansyah, S.Th.i., M.Kom.I

Sekretaris : Is Susanto, ME.E.Sy

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP.198008012003121

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
(Q.S Al- Baqarah Ayat 30)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*. . . . , h . 6.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu member perlindungan, kesehatan jasmani dan rohani, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku bapak Misno dan ibu Sumiem. Yang aku hormati dan aku sayangi cintai. Selalu memberikan yang terbaik untukku dengan sepenuh jiwanya. Yang selalu menyayangi, mengasihi, member motivasi dengan nasehat-nasehat yang sungguh berarti hingga skripsi ini selesai. Kesabaran, pengorbanan, dan Kasih sayangmu takkan ada yang dapat menggantikan. Dan pastinya selalu mendo'akan untukku kebahagiaanmu. Tanpa beliau aku tak bias seperti ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya
2. Kakakku satu-satunya yang tersayang Ansori dan adik peremuanku Sri Rahayu yang selama ini selalu memberikan senyuman manis sebagai motivasiku. Dan kau selalu mendo'akanku disetiap sholat mu. Sehingga aku bisa semangat menyelesaikan skripsii ni.
3. Keluarga besarku yang aku sayangi terimakasih telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi agar terselesaikannya skripsi ini.
4. Almamater tercinta, tempat ternyaman dan terbaik dalam menimba ilmu, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin maju, berkarya dan berkualitas dalam mendidik putra-putri Indonesia.

RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugerahi nama oleh kedua orang tua yaitu Ani Sholeha Dilahirkan di desa Subik. Pada tanggal 10 Juni 1997 yang merupakan anak Kedua dari tiga bersaudara pasangan ayah Misno dan ibu Sumiem.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Pendidikan sekolah dasar ditempuh di SD Negeri 02 Abung Tengah diselesaikan pada tahun 2009.
2. Menanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Abung Tengah diselesaikan pada tahun 2012 .
3. Melanjutkan Madrasah Aliyah Negri 01 Kotabumi Lamung Utara yang diselesaikan pada tahun 2015.
4. Kemudian pa datahun 2015 meneruskanpendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Pada Prodi Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan “ANALISI MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utar)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, parasahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, taklupa di haturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu

Disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta wakil Dekan 1, 2 dan 3.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam member arahan serta selaku motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Budimansyah. S.Th.i.,M.Kom.I dan Femei Pernamasari ,SE., M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Islam dan Institut yang telah memberikan informasi, data referensi, dan lain-lain.
5. Bapak Wiherson selaku Kepala Desa Subik , Bendahara Desa Alfiah, Kaur Pembangunan Desa M.Jafar, Ketua dusun dan masyarakat yang telah memberikan dukungan serta informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah B dan seluruh angkatan 2015 Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam yang selalu mendukung dan Menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan Perkuliahan khususnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang diraih bermanfaat danberkah dunia akhirat. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bias disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam Ukhuwah Islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bidang Khasanah Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 27 November 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Batasan Masalah	16
E. Rumusan masalah	16
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
G. Metode Penelitian	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen	25.
1. Pengertian Manajeme	25
2. Manajemen dalam Konsep Islam	30
a. Dasar Hukum Manajemen	31
b. Fungsi Manajemen	32
c. Pengukuran Kinerja	35
B. Desa.....	38
1. Pengertian Desa	38
2. Unsur-Unsur Desa.....	38
3. Fungsi Desa.....	39
4. Potensi Desa.....	39
C. Dana Desa	40
1. Penfertian Dana Desa.....	40
2. Tujuan Dana Desa.....	40
3. Penyuluhan Dana Desa	41
4. Penggunaan Dana Desa.....	42
5. Pengelolaan Dana Desa.....	42
6. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa	43
D. Pembangunan Desa	44
1. Pengertian dan Tujuan Pembangunan.....	44
2. Faktor-Faktor Pembangunan.....	45
3. Sasaran-Sasaran Pembangunan.....	45
4. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi.....	48
5. Pengertian Pembangunan Desa.....	50
6. Tujuan Pembangunan Desa.....	54

7. Sasaran-Sasarab Pembangunan Desa.....	55
8. Pendekatan Pembangunan Desa	56
E. Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	57
F. Kerangka Pikir	63
G. Penelitian Terdahulu	64

BAB III AMBARAN UMUM DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Subik	68
2. Kondisi Geografis Desa Subik.....	69
3. Kondisi Demografis Desa Subik.....	69
4. Struktur Organisasi desa	75
5. Visi dan Misi Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara	77
B. Analisis Penelitian	77
1. Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.....	77
2. Pembangunan Desa Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	87

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.....	92
1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Subik	92
2. Tahap penganggaran Pengelolaan Dana Desa Subik.....	93
3. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa.....	95
B. Pembangunan Desa Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABLE

1.1 Dana Desa yang diterima Desa Subik Periode 2016-2018	8
1.2 Program Pemerintah Desa Subik Yang Menggunakan Anggaran Dana Desa	9
1.3 Indikator – Indikator Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan	14
1.4 Tujuan pembanguna	15
3.1 Penduduk Desa Subik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	70
3.3 Fasilitas Berdasarkan Tempat Ibadah	70
3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71
3.5 Banyaknya Bangunan Fasilitas Pendidikan Desa Subik.....	72
3.6 Banyaknya sarana kesehatan.....	72
3.7 Kondisi Rumah.....	73
3.8 Kondisi Perekonomian Masyarakat Tahun 2018	74
3.9 Total Pendapatan Dan Pengeluaran Desa Subik.....	82
3.10 Realisasi Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah Desa Subik.....	83
3.11 Relisasi Bidang II Pelasanaan Pebangunan Desa Subik.....	83
3.12 Relisasi Bidang III Pelasanaan Pebangunan Desa Subik.....	84
3.13 Relisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Subik.....	84
3.14 Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2016-2018	85
3.15 Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Subik Tahun 2016-2018	86

3.16 Tingkat Manajemen Dana Desa di Desa Subik.....	86
3.17 Program Pembangunan Desa Subik	87
3.18 Pembangunan Fisik Desa Subik.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pengajuan Proposal Skripsi

Lampiran 2 : Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 3 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Tahun Akademik 2010/2020

Lampiran 4 : Blanko Konsultasi

Lampiran 5 : Panduan Wawancara



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.”(Studi pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)”**.

untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah – istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis adalah penguraian salah satu pokok atas beberapa bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperpoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
2. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, Edisi Keempat)*, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011

² Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2015, h. 1.

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³
4. Pembangunan Desa merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan - pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.⁴
5. Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang sesuatu hal.⁵
6. Ekonomi Islam Ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka.⁶

³A saibani., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, jakarta, Bee Media Pustaka, 2015, h. 4.

⁴Mustafa Edwin Nasution EI. At, *Pengendalian Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h 15.

⁵ Yusuf Qordhawi, *Fikuz Zakah Muassasat Ar-risalah* Beirut Libanan cet. II 1408 H/1998 terjemahan Didin Hafidudin, h .1.

⁶ Suhrawardi, Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Buana Raya, 2005, h .298.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan judul adalah menganalisa dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan manajemen dana desa di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dapat meningkatkan pembangunan yang kemudian ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini dan menetapkan judul diatas adalah sebagai berikut:

Alasan Objektif Dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen dana desa terhadap pembangunan desa pada desa subik kecamatan abung tengah kabupaten lampung utara.

C. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan social, politik, atau pun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembagunan dibidang sosial, politik, atau pun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan

produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.⁷

Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Pembangunan desa mengutamakan prinsip imbang kewajiban yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberi partisipasi dalam pembangunan yang dilaksanakan. Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan Negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional.

Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan pembangunan masyarakat desa (PMD) dan Pembangunan Desa (BangDes). Pada masa orde baru secara substensial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (*penyeragaman*) oleh pemerintahan pusat.

⁷ Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014), h .29 – 41.

Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*, pada era reformasi secara substensial pembangunan desa lebih kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantara program inpres desa tertinggal dan bantuan masyarakat tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat *botten-up* atau kombinasi *top-down* dan *botten-up*. Program pembangunan desa bersifat *botten-up* tertuang dalam undang-undang otonomi daerah (OTDA).⁸

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah⁹ maupun Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah¹⁰ sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Proses desentralisasi yang berlangsung yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian

⁸ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika Jakarta, Jakarta, 2006, h . 14.

⁹ Undang - undang Tentang Pemerintah Daerah

¹⁰ Undang - undang Tentang perimbangan keuangan pusat daerah

daerah. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah, yaitu desa.¹¹

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2015 tentang Desa pasal 68 ayat 1 dinyatakan bahwa tujuan dari alokasi dana desa ini adalah untuk:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

¹¹ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUS MEDIA, 2015, h. 54.

Berdasarkan tujuan alokasi dana desa diatas, salah satunya pemerintah mengharapkan dengan adanya pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pembangunan desa. Program alokasi dana desa di desa subik kecamatan abung tengah kabupaten lampung utara pada tahun 2018 jumlah Kepala Keluarga 980 dengan jumlah 4.702 Jiwa 2.467, dengan proporsi penduduk laki-laki , sedangkan penduduk perempuannya berjumlah 2.235 orang . Kondisi perekonomian di desa subik kecamatan abung tengah kabupaten lampung utara didominasi pada sektor pertanian (70%), dan lainnya merupakan pedagang, wiraswasta, PNS dan pensiunan (30%). Dalam pelaksanaannya besaran ADD tahun 2016-2018 Rp 2.011.275.200 tersebut dapat digunakan dalam peningkatan pendapatan masyarakat diantaranya: membangun infrastruktur yang memudahkan masyarakat dalam akses distribusi hasil pertanian ataupun membuat ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual.

Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan desa. ¹²Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.

¹² Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser". *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 3 No. 4 (Desember 2015), h. 2.

3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menuturkan bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur didaerahnya. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah desa, dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan. Sebelum pemerintah desa Subik menerima aliran Dana Desa (DD) secara keseluruhan program pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Dari data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Subik.

Tabel 1.1
Dana Desa yang diterima Desa Subik Periode 2016-2018¹³

No	Tahun	Jumlah
1	2016	Rp. 482.114.000
2	2017	Rp. 740.567.700
3	2018	Rp. 788.593.500
Jumlah		Rp.2.011.275.200

¹³ Alfiah, Wawancara bendahara desa Subik pada tanggal 5 maret 2019

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya program pemerintahan desa dalam pembangunan desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Namun, pengelolaan dana desa subik dalam pembangunan belum dapat terwujud karna pemerintah desa masih terfokus dalam pemberdayaan masyarakat.

T : Terlaksana

T.T : Tidak Terlaksana

S.B : Sedang Berlangsung

Table 1.2
Program Pemerintah Desa Subik
Yang Menggunakan Anggaran Dana Desa¹⁴

Bidan dan Jenis Kegiatan		Ket
Bidang program	Jenis Kegiatan	
Pembangunan Desa	Pembangunan Jalan telfot	T.T
	Pembangunan Pasar	T.T
	Gorong – Gorong	T
	Rabat Beton	S.B
	Pembangunan Drainase	T
	Jalan Lapen	T.T
	Gapura Balai Desa	T
	Paping Blog	S.B
	Rehap Kantor Desa	S.B

Sumber: kantor desa subik 2019

Fenomena yang ada pada Desa Subik, dapat dilihat pada tabel bahwa masih ada program kerja desa yang masih belum

¹⁴ M.Jafar, Wawancara bendahara desa Subik pada tanggal 5 maret 2019

teralisasi, infrastruktur tidak berubah. Pengelolaan keuangan desa seperti di dalam Perencanaan pembangunan program-program untuk desa masyarakat diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan atau musyawarah rencana pembangunan desa relative masih rendah dan hanya satu atau dua orang selain perangkat desa yang dijadikan formalitas untuk memenuhi daftar hadir musyawarah desa. Dan pada tahap pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes tidak diinformasikan kepada semua masyarakat desa secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan tidak tersedia papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya sebagai media penyampai informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan survei pendahuluan fenomena lainnya yang terjadi yaitu Partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pengelolaan dana desa, pengambilan keputusan, serta kritik dan saran belum baik keterlibatannya. Dalam pengelolaan dana desa perangkat desa terkadang belum terbuka mengenai dana yang digunakan. Pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat desa masih belum baik.

Adanya dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antara wilayah akan pula dapat dikurangi. Prinsip pemerataan dana desa dalam sistem pemerintah otonomi di Indonesia dewasa ini dilaksanakan dengan adanya sistem transfer pendapatan antara pemerintah dana desa dari pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat memacu

pemerintah daerah untuk mencapai kemandiriannya dalam pelaksanaan tugas – tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang amanah , memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan , karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sumber ekonomi Islam telah ditentukan oleh Allah SWT sebagai mana telah diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu,

*Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*¹⁵

Dari ayat diatas kata daulat dalam surah al-Hasyr ayat 7 menunjukkan makna distribusi harta dan terkait dengan petunjuk Allah SWT bagaimana seharusnya harta kekayaan itu di kelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi – bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan bahwa harta kekayaan itu tidak boleh menjadi satu komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang – orang kaya saja. Kalimat daulatan baina agniya dimaksudkan sebagai milkan mutadawalan bainabum khassah (hatra tersirkulasi khusus di kalangan mereka, maksudnya orang –orang kaya). Al- adulah adalah harta yang berputar dikalangan manusia dan beredar dari tangan ke tangan.

Kesenjangan kehidupan ekonomi dalam masyarakat akibat penumpukan kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dapat menimbulkan sikap destruktif. Bagi kelompok miskin akan muncul kebencian dan sakit hati terhadap orang –orang kaya yang hidup mewah. Penimbunan harta kekayaan yang berlebihan, dan setiap harta yang terbatas peredarannya pada orang – orang kaya saja, dan melarangnya terhadap orang – orang miskin tidak diterima oleh islam, akan tetapi seharusnya dari orang – orang kaya mengeluarkan dan mengedarkan hartanya terhadap sesamanya manusia serta memberikan haknya kepada orang – orang miskin agar terwujud suatu pemerataan.

Berdasarkan kegiatannya manajemen dana desa bertujuan untuk (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaa dan pengendalian pemabangunan secara partisipatif sesuai

¹⁵ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahnya* Q.S: Al-Hasyr ayat 7 PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h . 546.

dengan potensi desa, (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja bagi masyarakat desa, (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.¹⁶

Selain itu desa juga banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan Dana Desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnannya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa.
3. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas.

Hal ini yang dialami oleh pemerintah Desa subik kecamatan abung tengah kabupaten lampung utara dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan dana desa, penyaluran dana desa di desa subik, masih adanya jalan yang rusak, pengelolaan Dana Desa (DD). Tujuan dana desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat di

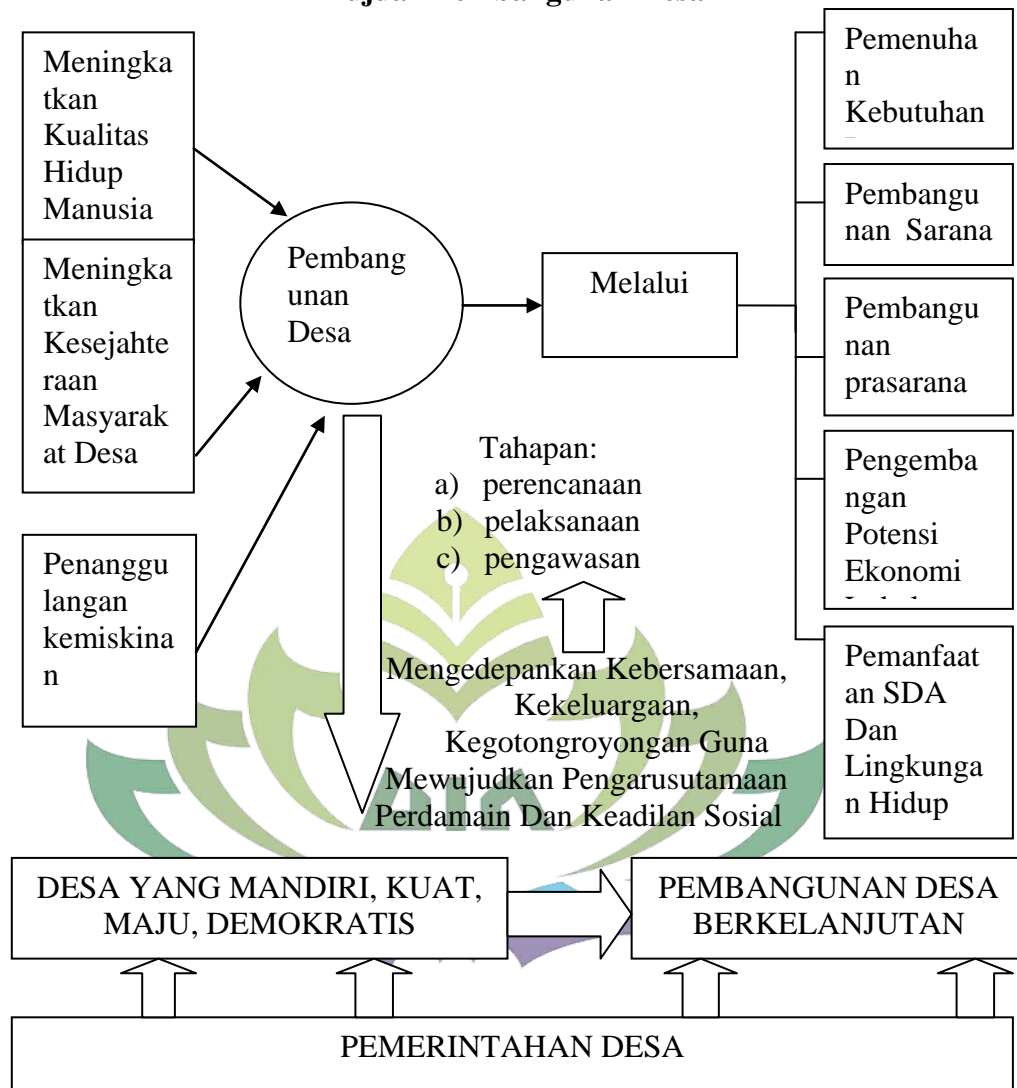
¹⁶ Haryati ‘ Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu’’, *Jurnal JOM FISIP*. Vol. 2 No. 1 ,h. 15.

tingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan.

Tabel 1.3
Indikator – Indikator Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan

Variable	Dimensi	Indikator
Manajemen Dana Desa (Sumarsono,2010)	Perencanaan (<i>Planning</i>)	Pemilihan Dan Penetapan Tujuan Oranisai
		Kegiatan Persiapan Melalui Perumusan Dan Penetapan Keputusan
	Pelaksanaa (<i>Acuanting</i>)	Pembagian Tugas
		Koordinasi
	Penganggaran (<i>Budgeting</i>)	Tata Laksana Keuangan
Pembangunan Desa (Indrawidjaja Dalam Iskandar,2016)	Target Hasil	Penggunaan Anggaran Yang Efektif Dan Efisien
		Pencapain Tujuan
		Keuasan atau Keuntungan

Table 1.4
Tujuan Pembangunan Desa



Berdasarkan dari uraian tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagai mana pengelolaan manajemen dana desa di daerah Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dalam pembangunan. Dari latar belakang diatas penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut kedalam sekripsi yang berjudul. **“ANALISIS MANJEMEN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA**

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. (Studi Pada Desa Sibuk Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara),”

D. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah yaitu, penelitian ini dilakukan berkaitan dengan analisis manajemen dana desa terhadap pembangunan desa dalam perspektif Ekonomi Islam. Dan difokuskan pada bendahara desa beserta jajarannya, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

E. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen dana desa terhadap pembangunan desa pada desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pembangunan desa pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui manajemen dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam mengenai manajemen dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung utara.

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat yang penulis peroleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau input bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan Manajemen dana desa terhadap pembangunan desa

2. Manfaat Praktis

Sedangkan kegunaan penelitian secara praktis adalah:

- a. Bagi desa

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, dan pengelolaan desa dalam menjalankan program yang telah ada, dalam hal ini program dana desa guna meningkatkan pembangunan desa.

b. Bagi penulis

Adanya penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, civitas akademik, dan pengelola sekolah dalam hal kajian ilmiah yang berkenaan dengan dana desa dalam pembangunan.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial.¹⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di Desa Subik.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu serta

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014, h. 2.

menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer.

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang asli. Adapun data primer diambil dari hasil penelitian lapangan dengan cara interview dan observasi.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam tiga kategori yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah (observasi terstruktur) observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan di mana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apa bila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variable yang akan diamati. Untuk mengamati kejadian yang komplek dapat menggunakan alat bantu misalnya seperti kamera, video tape, dan audio tape recorder. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

¹⁸ *Ibid*, h. 87.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat. Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas dan terpimpin. Wawancara bebas (wawancara tidak terstruktur) adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya beberapa garis – garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara terpimpin (wawancara terstruktur) adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan – pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Objek yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti Kepala Desa, Bendahara dan Kaur Pembangunan.¹⁹

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Data ini cenderung kepada data sekunder. Berdasarkan pengertian tersebut maka dengan ini penulis menggunakan metode kualitatif.

¹⁹ *Ibid*, h. 95.

d. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam hal ini kuesioner (angket) akan diberikan kepada masyarakat Desa Subik.

4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang terbatas dan tidak terbatas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Subik yang berjumlah 980 kepala keluarga (KK), Kepala Desa berjumlah 1 orang dan tokoh masyarakat berjumlah 1 orang. Jadi, total populasi dalam penelitian ini adalah 982 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan perhitungan metode slovin yaitu sebagai berikut.²⁰

²⁰ *Ibid*, h. 119.

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + ne^2}$$

Dimana:

n : Jumlah Sampel

N : Populasi Sampel

e : Batas Toleransi Kesalahan (10%)

$$n = \frac{982}{1 + 982 (0,1)^2}$$

$$= \frac{982}{10,82} = 90,7 = 91$$

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus slovin maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 91 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.²¹

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka pengumpulan data dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan

²¹ Ibid,h.218

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan memilih mana yang lebih penting untuk dipelajari sehingga dapat di tarik kesimpulan.²² Untuk kepentingan analisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan induktif, yaitu prosedur penelitian yang berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur untuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang yang berperilaku yang dapat dimengarti. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan merincikan kalimat kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa masih kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* . . . , h . 65.

anggaran APBDes serta bagaimana proses pengelolaan APBDes, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan pengelolaan dana desa menunjukan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses pengelolaan dana desa, serta dalam proses musrembang pada tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses pengelolaan dana desa.

Pada tahapan pelaksanaan dana desa di Desa Subik Kabupaten Lampung Utara ini penggunaannya sudah terfokus pada pembangunan desa yaitu pada perbaikan jalan rusak yang sudah di perbaiki melalui pembangunan jalan aspal dan jalan paving blog.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu *namus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata tersebut menjadi *managere* menangani. Pengertian manajemen berasal dari kata *to the manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan dengan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.²³

Terry memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.²⁴

Menurut Baldrone mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan

²³Priyo Sambodo, implementasi Dana Bantuan Pt. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan Di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 2 No. 2, h. 14.

²⁴ *Ibid*, h. 3.

Mukzizat mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan.²⁵

Andrew F. Sikula mengungkapkan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁶

Selanjutnya menurut Hamalik istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan dengan Baldrone yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia mencapai untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan

²⁵ Melayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h. 1.

²⁶ Usman Hunaini, *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan*, Edisi 4, Bumi Aksara, 2008 h. 5.

manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.²⁷ Manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.²⁸

Penting untuk diingat bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Pemimpin dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:²⁹

1) Perencanaan (*Planning*)

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternative - alternatif keputusan.

Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat

²⁷ *Ibid*, h. 70.

²⁸ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta , 2004, hlm.54

²⁹ *Ibid*, h. 67.

ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Proses perencanaan berisi langkah-langkah:

- a) Menentukan tujuan perencanaan.
- b) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan.
- c) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang.
- d) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan dan.
- e) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya

Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan yang selanjutnya dalam suatu organisasi. Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan organisasi. Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang baik, maka langkah-langkah penting yang harus diperhatikan adalah :

- a. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit dimengerti kerananya sulit pula direncanakan.
- b. Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.
- c. Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan.

bertujuan mengembalikan segala sesuatu kejalan yang benar, seandainya terlihat ada penyimpangan.

2) Pelaksanaan (*Acuanting*)

Pelaksanaan adalah semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Fungsi pengarahan merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pelaksanaan yakni:

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

3) Penganggaran (*Budgeting*)

Penganggaran adalah komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam anggaran suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan dan

dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Tujuan penganggaran

- a. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak – pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan
- b. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidak pastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan.
- c. Untuk mengkoordinasikan cara/ metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.

2. Manajemen dalam Konsep Islam

Definisi manajemen dalam Islam tidak jauh dari pembahasan ini. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan diawal perkembangan Islam. Kristalisasi pemikiran manajemen dalam Islam muncul setelah Allah S.W.T. menurunkan risalah-Nya kepada Nabi Muhammad S.A.W. Nabi dan Rasul akhir zaman. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Sunnah. Selain itu juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada

waktu tertentu.³⁰ Berbeda dengan manajemen konvensional ia merupakan sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata, dan tidak bersumber pada petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif, dan syarat kebenaran. Menurut Stonner, ia mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dari sumber-sumber organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara Follet mendefinisikan sebagai seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Dengan manajemen manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan.³¹

a. Dasar Hukum Manajemen

Allah S.W.T. berfirman mengenai dasar hukum adanya manajemen dalam Q.S. As-Sajadah ayat 5 :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu³²

³⁰ Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 28.

³¹ Subeki Ridhotullah dan Muhammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta, 2015, h. 1-3.

³² Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Diponegoro h. 440.

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (Al Mudabbir/ manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT. Telah dijadikan sebagai kholifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

b. Fungsi Manajemen

Menurut Ahmad Ibrahim Abu Siin dalam bukunya *Manajemen Syariah* adanya kesamaan dalam fungsi manajemen syariah yaitu : perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Namun menurut Didin Hafidhudin dalam bukunya manajemen syariah dalam praktek terdapat perbedaan dari empat fungsi manajemen Islam yaitu : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), dan pengawasan (*controlling*).

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Yang sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasi perencanaan dan pengawasan agar bias mewujudkan tujuan yang direncanakan. Dalam Islam, konsepsi perencanaan dengan berbagai variasinya dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil

musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten, orang yang cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan persoalan. Ketentuan ini berdasarkan pada petunjuk Allah S.W.T. seperti dalam firman-Nya Q.S. Yunus ayat 3 :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian Itulah Allah Tuhan kamu, Maka sembahlah Dia. Maka Apakah kamu tidak mengambil pelajaran³³

Selanjutnya petunjuk Allah S.W.T seperti dalam firman-Nya Q.S Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.³⁴

³³ Ibid, h. 208.

³⁴ Ibid, h . 394.

2) Pelaksanaan (*Acaunting*)

Pelaksanaan adalah fakta sosial yang tidak dapat dihindarkan untuk mengatur hubungan antar individu yang tergabung dalam suatu masyarakat. Dimana masing-masing individu memiliki tujuan kolektif yang ingin diwujudkan bersama dalam masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, yang dapat memberikan petunjuk atas segala persoalan kehidupan. Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S Al-Kahf ayat 2:

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

*Artinya: "sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik."*³⁵

3) Penganggaran (*Budgeting*)

Menurut Y. Supriyanto penganggaran yaitu suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana.

Allah S.W.T berfirman dalam Q.S Al-Qasas ayat 26:

³⁵ *Ibid*, h. 293.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجِرُّهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾

Artinya : "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".³⁶

c. Pengukuran Kinerja

Robert Simons menyebutkan *performance measurement system* membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau prestasi sebuah organisasi, dibutuhkan suatu ukuran atau kriteria sebagai indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitas dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu Anthony dan Young mmeberikan tiga kriteria pengukuran organisasi publik yaitu :

(1) *Process measures*(pengukuran proses), (2) *Result measures*

³⁶ *Ibid*, h. 388.

(pengukuran hasil), (3) *Social indicator* (indikator sosial). Berikut ini akan dibahas pengukuran proses dari pengukuran hasil :

a. *Process Measures* (Pengukuran Proses)

Pengukuran proses (dapat pula disebut dengan pengukuran produktivitas) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi. Perbedaan yang mendasar antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses adalah ; pengukuran hasil berorientasi pada hasil akhir dari kegiatan, sedangkan pengukuran proses berorientasi pada alat atau cara yang dipergunakan dalam pencapaian tujuan. Pengukuran proses berhubungan erat dengan pertanggungjawaban individual didalam membantu untuk mencapai tujuannya. Dalam hubungannya dengan pengawasan, maka pengukuran proses berkaitan dengan cara dalam melakukan pengawasan, yaitu : dengan melakukan pemeriksaan yang terdiri tiga tahapan yaitu : tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap laporan.

b. *Result Measures* (Pengukuran Hasil)

Pengukuran hasil dilakukan dengan maksud menghindari kesulitan dalam pengukuran indikator sosial. Pengukuran hasil mencoba mengekspresikan output dalam hubungannya dengan tujuan organisasi, sehingga dengan pengukuran hasil dapat kita ekspresikan tujuan organisasi secara terukur (*measurable*). Dalam hubungannya dengan pengukuran hasil pengawasan adalah yang berhubungan dengan laporan hasil pemeriksaan, apakah laporan hasil pemeriksaan

tersebut dapat memberikan suatu gambaran yang objektif tentang unit kerja yang diperiksa, dengan mana laporan hasil pemeriksaan tersebut dapat memuaskan pimpinan organisasi yang memberikan penugasan atau yang memberikan perintah, maupun pimpinan unit kerja yang diperiksa sebagai pelanggan, sehingga dapat membantu pimpinan untuk mengukur efektivitas organisasinya.

Selanjutnya LAN RI dan BPKP memberikan penjelasan tentang indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi, yaitu : indikator masukan (*input*), indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcomes*), indikator manfaat (*benefit*), dan indikator dampak (*impact*) berikut mengenai penjelasan indikator diatas :

- 1) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan akan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia,, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundangan dan sebagainya.
- 2) Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik.
- 3) Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah (efek langsung).
- 4) Indikator manfaat adalah sesuatu kegunaan yang berkaitan erat dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

- 5) Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

B. Desa

1) Pengertian Desa

UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

2. Unsur-Unsur Desa

- a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

- b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga Desa.
- d. Letak, yaitu pada umumnya selalu jauh dari kota atau pusat-pusat keramaian.³⁸

3. Fungsi Desa

- a. Hinterland atau daerah dukung yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela disamping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makanlain yang berasal dari hewan.
- b. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lambung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*).
- c. Dari segi kegiatan kerja Desa dapat merupakan Desa agraris, Desa manufaktur, Desa industri, Desa nelayan.³⁹

4. Potensi Desa

Potensi Desa terdiri dari dua yaitu potensi fisis dan potensi nonfisis.

- 1. Potensi fisis:
 - a. Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
 - b. Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.

³⁸ R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 11.

³⁹ R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, h. 7.

- c. Iklim, yang merupakan peranan penting bagi Desa agraris.
2. Potensi nonfisis:
- a. Masyarakat Desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
 - b. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial Desa yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif.
 - c. Aparatur atau pamong Desa yang kreatif dan berdisiplin sumber kelancaran dan tertibnya pemerintah Desa.

C. Dana Desa

1) Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁰

⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 1 ayat (2).

2. Tujuan Dana Desa

- a. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian Desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa.
- e. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

3. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dari RKUN ke RKUD:

- a. Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat Juli, dengan persyaratan:
 - 1) Perda APBD.
 - 2) Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - 3) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Desa TA sebelumnya.
- b. Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
 - 1) Laporan Dana Desa Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%.
 - 2) Laporan Dana Desa Tahap I telah diserap oleh Desa rata-rata paling kurang 75%.
 - 3) Rata-rata capaian output paling kurang 50%

4. Penggunaan Dana Desa

- a. Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan.
- b. Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c. Kewenangan Desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.

5. Pengelolaan Dana Desa

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

- 1) **Transparan**, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluasluasnya tentang keuangan Desa.
- 2) **Akuntabel**, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

- 4) Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.⁴¹

6. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Dana Desa Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output, untuk memantau optimalisasi penggunaan dana dan pencapaian output dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengalihan penyaluran melalui KPPN dalam mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat governance dan akuntabilitas Dana Desa.

a. Bupati/Walikota

Penetapan perkara mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa untuk memastikan hak keuangan Desa terpenuhi.

b. Pemda/BPKAD

Menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk memastikan penyaluran Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah.

c. Bupati/Walikota

Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

⁴¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa . . . , h. 9.

d. Pemda/BPKAD

Sisa Dana Desa di RKUD untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya.

e. Pemda/Pusat (Kemendes, Kemenkeu, Kemendagri)/APIP

Capaian output untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa.

D. Pembangunan Desa

1. Pengertian dan Tujuan Pembangunan

Pembangunan merupakan usaha bagi peningkatan mutu kehidupan manusia, sehingga aspek manusia tentu menjadi domain pembangunan. Pembangunan secara metafisis ialah perjalanan yang bertolak dari realitas menuju desiderata yaitu tahap demi tahapannya membawa kita semua ke hari esok yang lebih cerah, dengan mutu kehidupan yang lebih meningkat.⁴²

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pemberantas kemiskinan yang bersifat absolut.

Tujuan pembangunan:

- a. Meningkatkan tersedianya serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat banyak.

⁴² Suryana, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), h. 5.

- b. Meningkatkan taraf hidup, antara lain pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar kepada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan (dalam arti kesejahteraan sosial, jasmani dan rohani).
- c. Memperluas pilihan-pilihan social ekonomi dari perorangan dan bangsa, dengan memberikan kebebasan dari ketergantungan.

2. Faktor-faktor Pembangunan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subyek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b. Sumber Daya Alam

Sebagian besar Negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan suatu proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud di

antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan dengan mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan.

d. Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan.

Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur dan ulet. Adapun budaya yang menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros dan KKN.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal membutuhkan manusia untuk mengelolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya modal berupa barangbarang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan

ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.⁴³

3. Sasaran-sasaran Pembangunan

- a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
- b. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
- c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas strategi pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada:

- a. Meningkatkan output nyata/produktivitas yang tinggi yang terus menerus meningkat. Karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian

⁴³ Zulkarnain Djamin, *Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h. 11.

- bahan kebutuhan pokok untuk hidup, termasuk penyediaan perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- b. Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup.
 - c. Pengangguran dan pemberantasan ketimpangan.
 - d. Perubahan sosial, sikap mental dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintahan.

4. Teori-teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas.⁴⁴

Teori-teori pembangunan ekonomi menurut para ahli:

- a. Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, akan mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi.⁴⁵

⁴⁴Irawan, *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam* (Yogyakarta: BPFEEYOGYAKARTA, 2002), h. 5.

⁴⁵Sadono Sukirno, *ekonomi pembangunan Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua* (Kencana 2006), h.123.

- b. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi capital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Untuk golongan buruh, dikatakan bahwa golongan ini tergantung pada golongan kapitalis dan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Adapun golongan tuan tanah, mereka hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewakan. Menurut David Ricardo apabila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi capital terus-menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan di antara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga sampai pada tingkat keuntungan yang normal saja.⁴⁶
- c. Menurut Malthus untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus. Adanya perkembangan ekonomi atau kenaikan produksi diharapkan bila ada tabungan yang digunakan untuk keperluan investasi. Tetapi

⁴⁶ *Ibid*, h. 120.

investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif. Adapun kurangnya permintaan efektif disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang berakibat menekan tingkat upah dan di samping itu juga karena pendapatan yang diterima ada yang ditabung dan tidak dikonsumsi semua.⁴⁷

5. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat, karena lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup di wilayah pedesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, Desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan Desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.⁴⁸

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun Desa dan Desa membangun. Konsep membangun Desa dalam konteks

⁴⁷Irawan, *Ekonomika Pembangunan Edisi*, h. 6.

⁴⁸ Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 59.

perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, Desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan 80. Dalam pasal 79 dan 80 UU Desa disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencan Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁴⁹

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan Desa tidak semata-mata bersifat top down, namun juga menyusun konsep Desa membangun. Konsep Desa membangun ini mengedepankan

⁴⁹ Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah*, h. 10.

musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perencanaan pembangunan Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 - c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 - e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentrama

b. Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan Desa. Pada pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:⁵⁰

- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

c. Pertanggungjawaban

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 38 ayat 4 tentang pengelolaan keuangan Desa. ⁵¹Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 dan 80.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Desa Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 100.

dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, yaitu:

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
- 2) Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- 3) Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

6. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan Desa adalah:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang tersebar ke seluruh wilayah.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup, taraf hidup dan kemandirian masyarakat.
- c. Mewujudkan Desa dan kehidupan masyarakat Desa yang maju, namun tetap bisa mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya.
- d. Mendukung usaha-usaha menggalakkan ekspor non migas dari perekonomian pedesaan.

Tujuan-tujuan tersebut akan dicapai melalui berbagai tujuan khusus meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta perluasan lapangan kerja di pedesaan.

- b. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan dalam merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan serta memelihara obyek-obyek pembangunan yang ada, baik pada suatu Desa yang ada di kabupaten maupun di Kotamadya.
- c. Meningkatkan partisipasi semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat perantau, dalam berbagai usaha dan kegiatan pembangunan untuk wilayah pedesaan.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada atau yang dapat dikembangkan.
- e. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan proyekproyek sektoral dan regional yang dilaksanakan di wilayah pedesaan.⁵²

7. Sasaran-sasaran Pembangunan Desa

Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pedesaan adalah sebagai berikut:

- a. Ditatnya kembali Desa sehingga dapat menjalankan fungsinya menurut semestinya.
- b. Berfungsinya aparat, kelembagaan dan kepemimpinan Desa.
- c. Meningkatnya kemampuan prasarana fisik dan perekonomian pedesaan.
- d. Terciptanya lapangan kerja baru di pedesaan.

⁵²Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Desa Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . . . , h. 52.

8. Pendekatan Pembangunan Desa

a. Pendekatan Legalitas

Pendekatan legalitas berarti setiap gerak pembangunan pedesaan senantiasa tetap berlandaskan dan berpegang teguh pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Struktural

Melalui pendekatan struktural, setiap pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan tindak lanjutnya dilakukan oleh instansi/dinas dan jabatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan sesuai dengan hierarki yang ada, namun tetap dalam keterkaitan dan keterpaduan satu sama lainnya. Dengan demikian melalui pendekatan ini berarti bahwa pembangunan tidaklah dilaksanakan secara terkotak-kotak, pada bidang atau sektornya masing-masing.

Namun yang dimaksudkan disini adalah untuk meningkatkan peranan dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing, sehingga jelas siapa bertanggung jawab kepada siapa. Dalam setiap kegiatan yang direncanakan dan diprogramkan harus selalu mengacu kepada tujuan pokok pembangunan pedesaan, yakni pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan masyarakat yang maju, namun masih tetap dengan mempertahankan nilai-nilai sosial budaya yang positif.

c. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris ditempuh dalam arti bahwa penyelenggaraan pembangunan pedesaan, dan penetapan kebijaksanaan yang ditempuh selalu memperhatikan berbagai pengalaman pelaksanaan pembangunan sebelumnya dan berbagai hasilnya, serta melihat kepada berbagai potensi, sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah pedesaan yang bersangkutan.

d. Pendekatan Sosio-Kultural

Pendekatan yang lebih diutamakan dalam pembangunan di pedesaan adalah pengembangan potensi sumber daya manusia, dibandingkan dengan pengembangan potensi sumber daya alam.

E. Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan Ekonomi Islam adalah multidimensional. Pembangunan Ekonomi Islam bukan hanya pembangunan materiel, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan. Pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Inilah yang kemudian di dalam Al-Qur'an dinamakan dengan *tazkiyah an-nafs* sebagaimana firman Allah dalam QS. *Asy-Syams* ayat 7-10:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ

Artinya : “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”⁵³

Dalam ayat di atas, setelah bersumpah dengan Matahari, Bulan, siang, malam, langit, dan Bumi. Allah bersumpah atas nama jiwa manusia dan penciptanya yang sempurna. Lalu Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan ke dalam jiwa manusia. Qurthubi mengatakan bahwa, sebagian ulama mengartikan kata “nafs” sebagai Nabi Adam, namun sebagian yang lain mengartikannya secara umum, yaitu jiwa manusia. Menurut Asyur kata “nafs” dalam ayat berbentuk nakirah (tanpa alif lam takrif), ini menunjukkan nama jenis, sehingga mencakup jiwa seluruh manusia. Hal ini senada dengan penggunaan kata yang sama secara nakirah dalam QS. Al-Infithaar ayat 5:

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۚ

Artinya : “Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.”⁵⁴

Kata wamaasawaahaa mengandung penjelasan bahwa Allah SWT menciptakan diri setiap manusia dalam kondisi yang sama, tidak berbeda antar satu dengan lainnya. Dari kajian para ulama dirumuskan dasar-dasar filosofis pembangunan Ekonomi Islam yaitu tauhid, khalifah, keadilan dan tazkiyah:

1) Tauhid

Tauhid mengandung implikasi bahwa implikasi hidup dan alam semesta diciptakan oleh Allah SWT, karena itu tidak mungkin jagat raya ini dengan sendirinya atau muncul secara kebetulan. Hal ini ditegaskan di

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* Diponegoro, h . 595.

⁵⁴ *Ibid*, h . 587.

dalam QS. *Al-A'raf* ayat 172 tentang ketauhid-an makhluk-makhluk-

Nya:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi”. (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”,⁵⁵

2) Manusia: Khalifah fi al-Ardh

Adapun dasar dari filosofis Ekonomi Islam menyatakan bahwa fungsi manusia baik dalam konteks individu maupun anggota masyarakat adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hakikat manusia menurut pandangan Islam tidak bisa dilepaskan dari hakikat di balik penciptaan manusia ke dunia. Islam telah menjelaskan secara terperinci tentang tujuan diciptakannya manusia yang kemudian dikaitkan dengan peran manusia dalam kehidupan. Hal ini dijelaskan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 30:

⁵⁵ *Ibid*, h .151.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁵⁶

3) Keadilan

Keadilan berarti pembangunan ekonomi yang merata, dimana konsep persaudaraan umat manusia hanya akan berjalan jila dibarengi dengan konsep keadilan. Oleh karena itu, menegakkan keadilan dinyatakan oleh Allah SWT sebagai salah satu tujuan utama yang akan dicapai oleh para rasul Allah dan Al-Qur'an meletakkan keadilan paling dekat kepada takwa. Hal ini dijelaskan dalam QS. *Al-Hadid* ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan

⁵⁶ Ibid, h. 6 .

*supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.*⁵⁷

4) Tazkiyah

Tugas yang diemban para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dengan Allah (*hablun minallah*), dengan manusia sesamanya (*hablun min an nas*), dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta negerinya. Hal ini digambarkan di dalam QS. *Al-Hadid* ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar".⁵⁸

Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Berdasarkan dasar-dasar filosofis di atas selanjutnya dapat diperjelas melalui prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam sebagai berikut :

- a. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komperhensif dan mengandung unsur spiritual, moral, material. Pembangunan merupakan

⁵⁷ *Ibid*, h . 541.

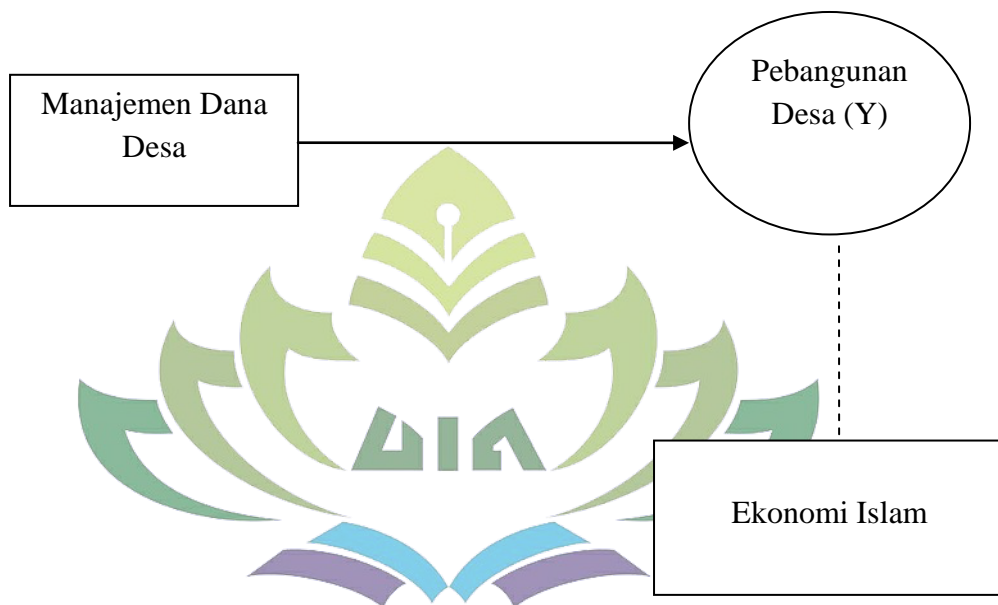
⁵⁸ Departemen Agama RI ,*Al-Qur'an Terjemahnya*. . . . , h. 538.

aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material dunia, tetapi juga akhirat.

- b. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
- c. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- d. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah S.W.T. kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya, secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sifat kufur dan zalim.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵⁹ kerangka pikir dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini.



Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah menganalisis tentang Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dalam perspektif Ekonomi Islam pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara. Karena di Desa Subik terdapat beberapa masalah, diantaranya yang paling terlihat adalah tertinggalnya dalam hal pembangunan Desa dibandingkan dengan pembangunan Desa lainnya yang ada di satu kecamatan yaitu Kecamatan Abung Tengah. Kemudian

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, h. 93.

dari masalah tersebut nantinya akan di analisis dalam konsep Ekonomi Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang program Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan Desa dari beberapa penelitian sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan peneliti.

1. Endang Juliana, “Manajemen Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dana Desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh dalam kajian ini merupakan data primer melalui wawancara dan pengisian angket. Penelitian ini berlokasi di Pedesaan di Kabupaten Asahan. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian menggunakan data primer yang didapatkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.
2. Edwein Kambey, “Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten

Minahasa Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Dana Desa terhadap pembanguna desa di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara serta untuk mengetahui manajemen Dana Desa terhadap pembangunan desa ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kecil. Penelitian ini berlokasi di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.

3. H.Makmur Kambolong, S.E., M.Si. dan Dra. Suriyani BB, M.Si., “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian

ini juga menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Dana Desa terhadap pembangunan desa pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara serta untuk mengetahui manajemen Dana Desa terhadap pembangunan desa ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian menggunakan data primer yang didapatkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.

4. Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani dan M. Agus Salim, “Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan lokasi penelitian ini di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara serta untuk mengetahui bagaimana manajemen Dana Desa terhadap

pembangunan desa ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian menggunakan data primer yang didapatkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.

5. A.Sulis Setyawati, “Manajemen Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara serta untuk mengetahui bagaimana manajemen Dana Desa terhadap pembangunan desa ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser". *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 3 No. 4 (Desember 2015), h. 2.
- Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Komtemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.28
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT. Bumi Prakasa, 2010), h. 24.
- Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014), h.29 – 41
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUS MEDIA, 2015, h. 54
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Al-Hasyr ayat 7 PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h.546
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, diponorogo, 2005, hlm.440
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, Edisi Keempat)*, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, JOM FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015
- Kalimandhanu, Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume Nomor, 2014 : 2008 – 2022
- Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta , 2008, hlm.54
- Melayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.1

- Mustafa Edwin Nasution El. At, *Pengendalian Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 15
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 1 ayat (2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 100. Pustaka, 2015, h.4
- R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 11.
- Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 59.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika Jakarta, Jakarta, 2006, hlm. 14
- Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2015, hlm. 1
- Subeki Ridhotullah dan Muhammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta, 2015, hlm. 1-3
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 2
- Suhrawardi, Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Buana Raya, 2005, h.298.
- Suryana, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), h. 5
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 dan 80.
- Usman Hunaini, *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan*, Edisi 4, Bumi Aksara, 2008 hlm.5.
- Wawancara dengan penulis Alfiah Desa Subik 26 September 2019

Wawancara dengan penulis Herlison Desa Subik 26 September 2019

Wawancara Dengan Penulis Komarudin Desa Subik 26 September 2019

Wawancara Dengan Penulis M Jafar Desa Subik 26 September 2019

Wawancara Dengan Penulis Muji Rinjani Desa Subik 26 September 2019

Wawancara Dengan Kepala Desa Ridwan Desa Subik 26 September 2019

Yusuf Qordhawi, *Fikuz Zakah Muassasat Ar-risalah* Beirut Libanan cet. II 1408 H/ terjemahan Didin Hafidudin, hal. 1

Zulkarnain Djamin, *Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 200), h. 11

